



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN JEMAJA BARAT

Jl. Usman Matwan – Desa Impol Kode Pos 29792

Impol, 24 Desember 2021

Kepada

Yth . Kepala Badan Penelitian

Pengembangan dan Perencanaan

Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas

di

Tarempa

SURAT PENGANTAR

Nomor : 213 / KJB – Program.050 / 12. 2021

No	Jenis yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Bersama ini kami kirimkan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Kecamatan Jemaja Barat setelah di Revisi	2 (Dua) Rangkap	Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PIL. CAMAT JEMAJA BARAT,



APRIZAL, A.Mk

Penata Tk I (III/d)

NIP. 19740425 199312 1 001

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



[RENSTRA 2021 - 2026]

KECAMATAN JEMAJA BARAT
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021 - 2026

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayahnya, sehingga dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Barat ini merupakan cerminan apa yang akan dilakukan 5 (Lima) tahun ke depan. Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Barat merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (Lima) tahunan yang menjadi komitmen untuk dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Barat yang telah ditetapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga Tujuan Kecamatan Jemaja Barat dapat tercapai dalam membangun daerah kita tercinta ini.

Impol, 24 Desember 2021

Pt. CAMAT JEMAJA BARAT,



APRIZAL, A.Mk

Penata Tk I (III/d)

NIP. 19740425 199312 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	
2.1. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)	12
2.2.2 Sarana Prasarana	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan	16
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan	17
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	
2.4.1 Tantangan	18
2.4.2 Peluang	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	20
3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	22
3.2.1 Visi	22
3.2.2 Misi	23
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra	24
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri.....	24
3.3.2 Telahan Renstra Provinsi Kepulauan Riau.....	24
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	31
4.1. Tujuan	31
4.2. Sasaran.....	31

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	32
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	34
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	42
BAB VIII	PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kecamatan Jemaja Barat Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2021
Tabel 2.2	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2021
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2021
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2021
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tabel 3.3	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jemaja Barat
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas

Gambar 2.2 Kondisi PNS Lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memantapkan implementasi formulasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana setiap masing-masing satuan kerja perangkat daerah berkewajiban menyusun dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

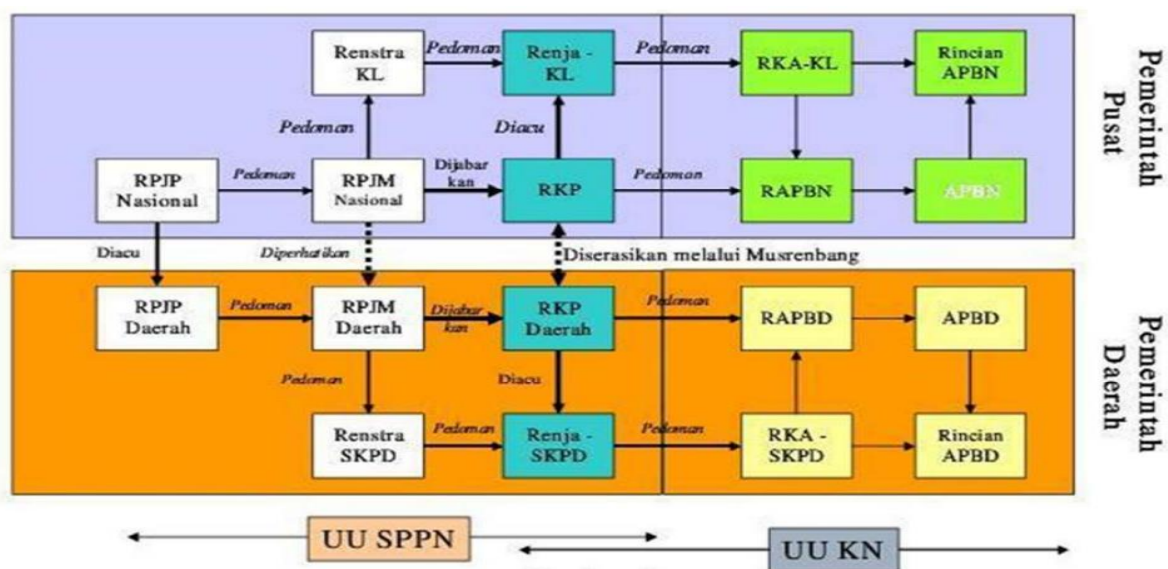
Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: (1) Rencana pembangunan jangka panjang daerah; (2) rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan (3) rencana pembangunan tahunan. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, Strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jemaja Barat yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahunan. Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2021-2026 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal,

penyusunan rancangan kerja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Barat mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas serta dokumen yang terkait, seperti RTRW, Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, Rencana Strategis Provinsi Kepulauan Riau, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana Strategis perangkat daerah. Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Jemaja Barat dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 serta rencana pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2021-2026 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yang juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2021-2026 dilaksanakan simultan dan bersinergi dengan proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Adapun hubungan antar dokumen sebagaimana dapat dilihat pada **gambar 1.1**



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Merupakan Peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri (kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 73);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.
15. Rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah sebagai acuan resmi bagi Kecamatan Jemaja Barat dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Barat dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Kecamatan Jemaja Barat.

Adapun Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2021–2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat bahasan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan Isu-isu Strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu Strategis dan hasil penentuan isu-isu Strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu Strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Kecamatan Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.

Dalam Pelaksanaan Tugasnya Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
3. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
7. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
8. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan, Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Type B terdiri atas :

1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah

2. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada kecamatan.

4. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program melaksanakan tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing seksi pada kecamatan.

5. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada kecamatan.

6. Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

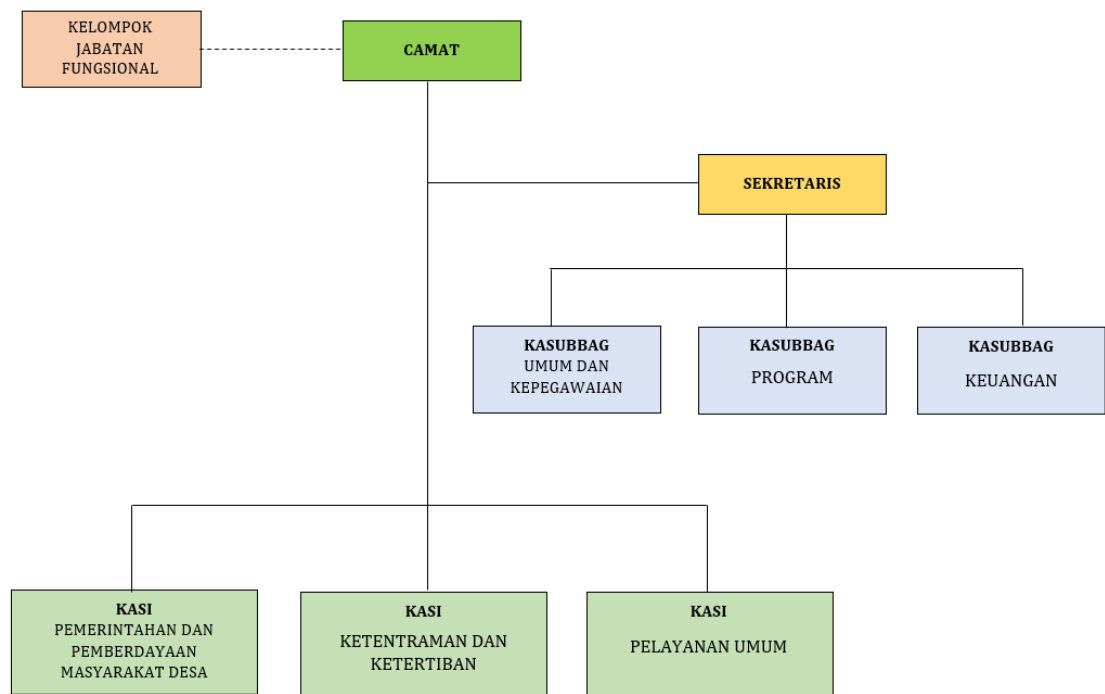
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

8. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi Pelayanan Umum.

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai berikut:

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Kecamatan Jemaja Barat



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal:

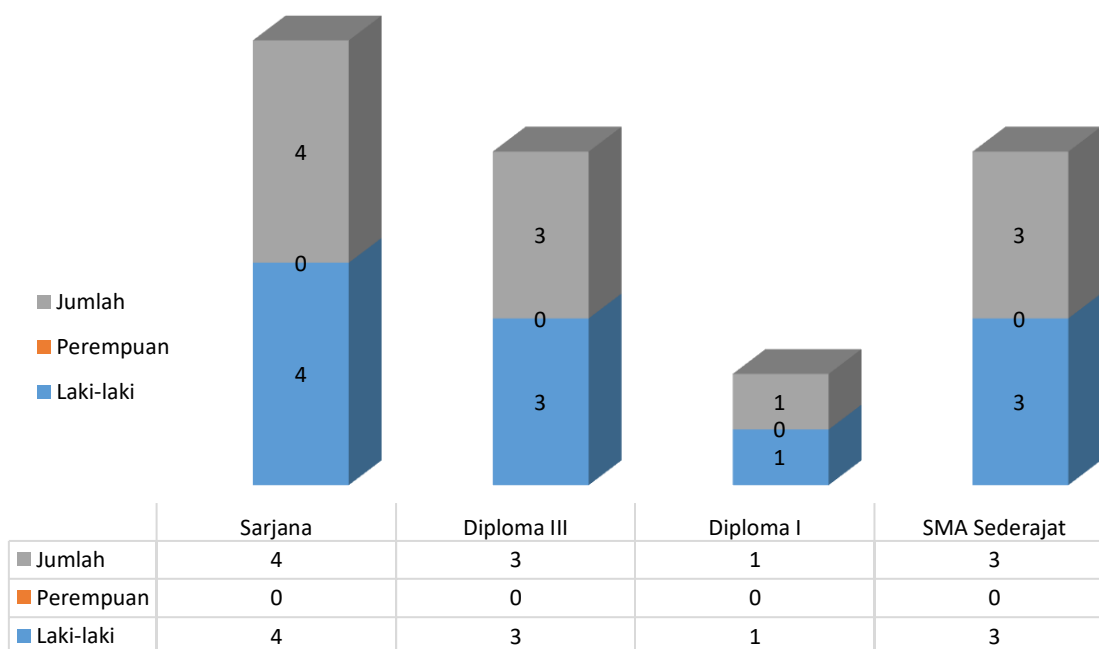
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap Pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good Governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan

datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan di bawa

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari PNS dari tingkat pendidikan dengan kondisi sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kondisi PNS Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020



Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian dilihat Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat / Golongan	Eselon	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Tk.I / IV.b		1	-	1
2	Penata Tk.I / III.d		2	-	2

3	Penata / III.c		2	-	2
4	Penata Muda Tk.I/ III.b	-	1	-	1
5	Penata Muda / III.a	-	1	-	1
6	Pengatur / II.c		4	-	4
Jumlah			11		11

Adapun Sumber daya Manunisia (SDM) Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat terdiri dari Pegawai Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap Tahun 2021, sebagai berikut:

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
1	SUPRIYADI, S.IP NIP. 19631114 198603 1 021	Pembina Tk.I IV/b	Camat
2	APRIZAL, A.Mk NIP. 19740425 199312 1 001	Penata Tk.I III/d	Sekcam
3	RAMZI, S.Pd NIP. 19701101 201001 1 007	Penata Tk.I III/d	Kasi Pelayanan Umum
4	MUHAMMAD ARIAS, S.Pi NIP. 19811119 201001 1 001	Penata III.c	Kasi Tata Pemerintahan
5	MUDAHIR, S.Pi NIP. 19840609 201404 1 001	Penata III.c	Kasi Trantib
6	ILHAM EFENDI CHAN, A.Md NIP. 19790506 201001 1 019	Penata Muda Tk.I III/b	Kasubbag Program
7	BAMBANG SUHARJITO, A.Md NIP. 19771125 201001 1 010	Penata Muda III.a	Kasubbag Keuangan
8	SAID ABDUL BASID, A.Md NIP. 19811129 201001 1 001	Pengatur / II.c	Administrasi Umum
9	SYAFARI NIP. 19761106 201101 1 001	Pengatur / II.c	Administrasi Umum
10	IDIL PUTRA NIP. 198409202010011011	Pengatur / II.c	Administrasi Umum
11	IWAN SUVIADI NIP. 19850424 201101 1 001	Pengatur / II.c	Administrasi Umum
12	RINGGA ISSADA, S.Sos NIPTT. 199506153994	-	Analisis Layanan Umum
13	ARYO NIPTT. 198901270944	-	Pengadministrasi Umum
14	RIAN TIRTA SAPUTRA NIPTT. 199110073464	-	Pengadministrasi Umum
15	SUHARTI NIPTT. 199110252811	-	Pengadministrasi Umum
16	HENI FATMASARI NIPTT. 198811203458	-	Pengadministrasi Umum

17	WAHYU ADITAMA NIPTT. 199702133917	-	Pengadministrasi Umum
18	DIDIT SUGIANTO NIPTT. 199808253964	-	Pengadministrasi Umum
19	YOSHENDRI NIPTT. 198009054330	-	Pramu Kebersihan
20	SHARUL FIRDAUS NIPTT. 198904150219	-	Pengelola Kantib SATPOL PP KKA
21	SYAFRILLAH NIPTT. 198308050324	-	Pengelola Kantib SATPOL PP KKA
22	ANCE SIANDU NIPTT. 198801080923	-	Pengelola Kantib SATPOL PP KKA
23	FITRIANA SARI NIPTT. 198611239466	-	Pengelola Kantib SATPOL PP KKA
24	SITI MARDIAH, S.Sos NIPTT.199703064672	-	Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Desa
25	ISMAIL, S.Sos NIPTT.199406054684	-	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
26	RAFIYA NIPTT.199404304389	-	Analisis Layanan Umum

2.2.2 Sarana Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Jemaja Barat telah memiliki sarana dan prasarana berupa, kendaraan Roda dua, serta Perlatan mesin perkantoran lainnya penunjang pelayanan publik.

Adapun kondisi sarana dan prasarana tersebut sebagaimana terlihat pada data sebagai berikut:

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2020

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Tahun Pembelian	Nilai Aset (ribuan Rp)
			Baik	Rusak		
1	Kursi Putar	4	√	-	2020	12.751,200,00
2	Lemari Besi	2	√	-	2020	7.560,000,00
3	Laptop HP intel Core i5	2	√	-	2020	21.950,000,00

Kecamatan Jemaja Barat – Kabupaten Kepulauan Anambas

4	Printer Epson L3150	1	√	-	2020	5.650,000,00
5	Printer Epson L110	2	√	-	2020	6.500,000,00
6	Scaner Epson Ds - 410	1	√	-	2020	5.410,000,00
7	Alat Dapur	1	√	-	2020	5.180,000,00
8	Kipas Angin	5	√	-	2020	3.175,000,00
9	Lemari Besi W016	1	√	-	2020	3.700,000,00
10	Lemari Besi W017	1	√	-	2020	3.950,000,00
11	Meja Kerja Pejabat	4	√	-	2020	13.600,000,00
12	Meja Kerja Pemimpin	2	√	-	2020	7.000,000,00
13	Kamera Digital	1	√	-	2020	9.075,000,00
14	Personal Komputer	2	√	-	2020	17.500,000,00
15	Laptop Core i7	2	√	-	2020	40.760,000,00
16	Laptop Core i5	3	√	-	2020	33.000,000,00
						196.761,200,00

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun kinerja pelayanan Kecamatan Jemaja Barat selama 5 (lima) tahun Periode Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2020 atau terhitung sejak terbentuknya Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 73), sebagai berikut:

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan

kinerja pelayanan Kecamatan Jemaja Barat selama 5 (lima) tahun Periode Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2020 dapat dilihat pada **tabel 2.3**.

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JEMAJA BARAT
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -	Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -									
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021					
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	B	-					B	B				cc	-				cc	-
2	Indeks Kepuasan layanan Masyarakat	-	80	-					75.00	77.00				74.00	-				98.67	-
3	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	-	B	-					B	B				B	-				B	-
4	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan	-	B	85%					85%	87%				85%	-				100.00	-

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas, diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun Realisasi pendanaan tersebut tertuang dalam **tabel 2.4**.

Tabel 2.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JEMAJA BARAT
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BELANJA TIDAK LANGSUNG																	
Belanja Gaji dan Tunjangan	0.00	0.00	0.00	0.00	821,208,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,739,254.0	0.00	0.00	0.00	0.00	92.64	0.00	0.00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	0.00	0.00	0.00	0.00	809,832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,590,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	109.35	0.00	0.00
BELANJA LANGSUNG																0.00	0.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																0.00	0.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	0.00	0.00	0.00	0.00	119,992,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,992,878.0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Kegiatan Penyediaan Rutinitas Perkantoran	0.00	0.00	0.00	0.00	564,192,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,723,966.0	0.00	0.00	0.00	0.00	99.56	0.00	0.00

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Kecamatan yang baru terbentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2019.
- b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan Sarana dan Prasaranan Perkantor Penunjang Rutinitas Perkantoran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil analisis yang menjadi Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat dalam Sinergisitas antara Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 dan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Barat 2021-2026, Sebagai berikut:

2.4.1 Tantangan

Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah yang harus dihadapi oleh Kecamatan Jemaja Barat ke depan antara lain:

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
2. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi, Informasi, Keterampilan dan Pengembangan Disiplin Keilmuan dibidangnya.
3. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.
4. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.
5. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif dan ruang yang kreatif.
6. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.2 Peluang

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan, antara lain:

1. Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan teknologi, Informasi, Keterampilan dan Pengembangan Disiplin Keilmuan dibidangnya bagi aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat.
2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan.
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Jemaja Barat berfungsi sebagai urusan penunjang administrasi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Jemaja Barat masih menghadapi beberapa permasalahan yang di identifikasikan pada **tabel 3.1** sebagai berikut:

Tabel 3.1

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

KECAMATAN JEMAJA BARAT - KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Aparatur Pegawai Negeri Sipil	1 Belum Optimalnya Penataan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah 2 Sumber Daya Manusia (SDM) Tidak Sesuai Anjab 3 Keterbatasan Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Reformasi dalam Penataan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah 2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah 3 Tersedianya Anggaran Berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU)
2	Sarana dan Prasarana Perkantoran	1 Keterbatasan Ruang Pelayanan Publik 2 Minimnya Perawatan dan Mesin Perkantoran dalam menunjang aktifitas Perkantoran	1 Belum Memiliki Gedung Permanen 2 Keterbatasan ketersediaan anggaran belanja modal aset peralatan dan mesin
3	Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban	1 Adanya pelanggaran perda perijinan 2 Meningkatnya Angka Kriminalitas / Penyakit Masyarakat	1 Kurang sosialisasi Perda perijinan 2 Kurang Tenaga pengamanan wilayah dan Keamanan Lingkungan dalam Penanganan Pekat
4	Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	1 Standar pelayanan publik belum memenuhi standar pelayanan	1 Standar sarpras pelayanan Publik belum memenuhi 2 Kurangnya Media informasi kepada masyarakat terbatas
5	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas	1 Praktek outsourcing 2 Tidak ada keterbukaan informasi kontrak Ketenagakerjaan dari pihak perusahaan yang beroperasi di kecamatan kute siantan	1 Mengadakan Program pelatihan keterampilan dan penyertaan Modal usaha 2 Pelatihan Bagi Pencari Kerja

Kecamatan Jemaja Barat – Kabupaten Kepulauan Anambas

6	Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1 Keterbatasan kewenangan dan kemampuan kecamatan dalam pembinaan 2 Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perlu dukungan Penganggaran untuk pelaksanaan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat 2 Perlu Sosialisasi perangkat desa tentang pengelolaan dana desa dan pengadaan barang tingkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku
7	Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Minimnya ketersedianya pasar tradisional di wilayah kecamatan kute siantan 2 Kurang pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perlu pembangunan pasar rakyat secara merata di desa kecamatan kute siantan 2 Perlunya peningkatan Pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan Pasar oleh Perangkat Daerah Pelaksana Teknis
8	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan Angka Pendidikan Jenjang SMP dan Penerapan Sistem Zonasi dalam penerimaan siswa 2 Penerapan Sistem Zonasi dalam penerimaan siswa dan Peningkatan keterampilan Angkatan siap kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pembanguan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru di Kecamatan Kute Siantan 2 Pembangunan Sekolah Kejuruan di Bidang Idustri, perikanan dan Pariwisata
9	Palayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Keterbatasan Ketersediaan Tenaga Medis 2 Kurangnya Saprass Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mendistribusikan Tegana medis sesuai kebutuhan 2 Pengadaan Saprass Kesehatan
10	Perikanan, Pertanian Dan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tidak Tersedianyan Pabrik Es / Cold Storage 2 Tidak Tersedianya Tempat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tangkapan Nelayan 3 Adanya gangguan dan Kekawatiran Nelayan dari ancaman Nelayan Asing 4 Belum Tersedia Desa Swasembada Pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pembagunan Pabrik Es 2 Pembangunan Pasar Ikan Bersih 3 Pengadaan Kapal Pengawas Sumber daya Kelautan Perikanan 4 Kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal Teluk Bayur dan Matak
11	Perencanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Persentase Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kecamatan masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perlu adanya Skala Prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan musrenbang
12	Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Minimnya pelaksanaan Pemeliharaan terhadap kondisi rusa jalan di pulau matak 2 Ketersediaan Cadangan Air Minum pada saat kemarau 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perlu pemeliharaan ruas jalan secara rutin dan berkala dari perangkat daerah pelaksana teknis 2 Peningkatan Pembangunan SPAM
13	Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Eksploitasi Kawasan Mangrove dalam pembangunan 2 Tidak Tersedianya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir 	<ol style="list-style-type: none"> 1 perlu adanya perda tentang konvensasi terhadap pembangunan dikawasan mangrove 2 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (sistem sanitary landfill) Kec. Kute Siantan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif untuk mencapainya. Bagaimana pelayanan harus dilaksanakan oleh suatu organisasi tidak terlepas dari Visi yang dimilikinya.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan memperhatikan serta mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, maka Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Kepulauan Anambas yang hendak dicapai pada Tahun 2021 -2026 adalah.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah II (Anambas Bermadah II)”

Kalimat Visi mengandung tiga kata kunci yaitu *Kabupaten Maritim Terdepan, Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah*, Secara filosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

KABUPATEN MARITIM TERDEPAN

Kabupaten Kepulauan Anambas terletak digaris terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan Negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi hasilnya dapat menjadikan kabupaten setara, bahkan melampaui capaian dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekpresikan dalam kehidupan masyarakat.

BERDAYA SAING

Menunjukkan kemampuan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancer, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat,

infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

MAJU

Pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Maju juga dimaknai memiliki system kesehatan yang tangguh yaitu siap menghadapi wabah atau pandemi dimasa-masa mendatang.

Selain itu maju juga mencakup sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencarian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersementera dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah.

BERAKHLAKUL KARIMAH

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat melayu yakni dengan mengedepankan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maksudnya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Kepulauan Anambas, budaya melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan Visi dirumuskan melalui Misi sebagai penjabaran visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang akan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021–2026, adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata;

3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi; dan
4. Melanjutkan Pembinaan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.;

Dalam Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat melaksanakan Misi Ke- 1 dengan Program Unggulan adalah Program "Mendorong peran serta Pemuda, Perempuan dan Anak Dalam Pembangunan serta Menciptakan kehidupan Masyarakat yang Berbudaya, Toleran, dan Gotong Royong" Misi Ke- 3 dengan Program Unggulan adalah Program "Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)".

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2021–2026 yang merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berkesesuaian dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, sehingga kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Kecamatan Jemaja Barat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut sasaran Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Periode Tahun 2020-2024 periode 2015-2019 sebagaimana disajikan pada tabel berikut **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3

**INDIKATOR KINERJA DAN INDIKASI TARGET SASARAN STRATEGIS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024**

NO	TUJUAN / SASARAN	STRATEGIS / INDIKATOR	TARGET	
			2020	2021
1	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	a Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia		
		1 Indeks Demokrasi Indonesia.	77.36	78.66
		2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.	77,5% (Pilkada)	79,5% (Pilkada)
		3 Indeks Kinerja Ormas.	-*	Nilai 70
		b Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah		

Kecamatan Jemaja Barat – Kabupaten Kepulauan Anambas

		1	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Nilai 2,38	Nilai 2,40
		2	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).	67.1	67,5
		3	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.	Nilai 2,865	Nilai 2,885
		4	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	2,310	2,310
		c	Meningkatnya kewaspadaan nasional.		
		1	Indeks Kewaspadaan Nasional	-*	64
		d	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.		
		1	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".	-*	150 daerah
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.	-*	Nilai 60
2	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.	a	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.		
		1	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	15%	80%
		2	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
		3	Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
		4	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.	Nilai 3,00	Nilai 3,60
		b	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.		
		1	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
		c	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.		
		1	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
		2	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)
		3	Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	30%	100%
		4	Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	-*	Nilai 80 (Sangat Sinkron)

Kecamatan Jemaja Barat – Kabupaten Kepulauan Anambas

		5	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	10%	75%
		6	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Nilai 36	Nilai 37
		7	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.	.*	36%
		8	Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".	55 Daerah	165Daerah
		9	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.	Nilai 80	Nilai 100
		10	Indeks Kapasitas Inspektorat	.*	Nilai 90 (A)
		d	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.		
		1	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan
		2	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Komulatif)	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna
		e	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.		
		1	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.	.*	Nilai 60
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.	a	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.		
		1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	85,01	93,01
		b	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas		
		1	Indeks Pengawasan Internal.	Nilai 80	Nilai 100
		2	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.	Nilai 80	Nilai 85
		c	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri		
		1	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	40%	65%

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah harus menerapkan prinsip – prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelebagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. Dasar utama perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan Strategis adalah dengan melakukan pembinaan dan pengendalian orgasisai dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi antar daerah dan antar sektor, sehingga masing – masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, yang dilaksanakan melalui fasilitas, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu – Isu Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas yang mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran Strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam

perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitik beratkan pada bangunan fisik infrastruktur harus mengacu pada Keputusan pelimpahan kewenangan Kepala Daerah. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.

Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas. Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan

tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak ada pembatasan apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Jemaja Barat

e. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Pemberdayaan Perempuan di Desa juga merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Desa.

f. Masih minimnya fasilitas yang ramah terhadap isu gender

Peningkatan pelayanan yang responsif terutama pada keadilan gender dan penyandang disabilitas

g. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi

penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Jemaja Barat 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Jemaja Barat memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu: ***“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Profesional, Responsif dan Inovatif Menuju Pelayanan Prima Bagi Masyarakat”***.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu:

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jemaja Barat dengan formula hasil Evaluasi Inspektorat;
- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula hasil survey kepuasan masyarakat; dan
- Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Jemaja Barat menetapkan Sasaran sebagai berikut:

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu:

- Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Jemaja Barat yang baik, bersih dan akuntable.
- Meningkatnya pelayanan Publik Kecamatan Jemaja Barat.
- Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Jemaja Barat.

Gambaran lengkap terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jemaja Barat sebagaimana **tabel 4.1** berikut.

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN JEMAJA BARAT
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan		Indek Reformasi Birokrasi	CC 50,57	B 60.80	B 66.50	B 68,00	B 69,00	BB 70,00
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B 76.00	B 80.00	B 81.00	B 81.85	B 82.85
2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, Perempuan dan Anak dalam Pembangunan serta menciptakan kehidupan Masyarakat yang berbudaya toleran dan Gotong Royong	Persentase Desa Berkembang Menuju Desa Mandiri	25%	40%	60%	80%	90%	95%
			Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	50%	60%	70%	90%	100%	100%

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategis merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategis diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan Perangkat Daerah merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Jemaja Barat. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Strategis dan kebijakan Kecamatan Jemaja Barat tahun 2021-2026 sesuai dengan misi Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun Strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas dalam lima tahun mendatang, yaitu dari **Tabel 5.1**.

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi : Kepulauan Anambas Sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berahlakul Karimah (Anambas Bermadah II)				
Misi 3 : Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan Melayani Serta Otonomi Desa yang Besinergi				
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan		1 Mengoptimalkan Tatakelola Kecamatan Jemaja Barat yang baik Bersih dan Akuntabel	1 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nefotisme (KKN)
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	2 Mengoptimalkan System Pelayanan Publik	2 Peningkatan kualitas pelayanan public Kecamatan Jemaja Barat

Kecamatan Jemaja Barat – Kabupaten Kepulauan Anambas

2	<p>Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p>Meningkatnya Partisipasi Pemuda, Perempuan dan Anak dalam Pembangunan serta menciptakan kehidupan Masyarakat yang berbudaya toleran dan Gotong Royong</p>	<p>1 Mengoptimalkan Tatakelola Desa Berkembang Menuju Desa Mandiri</p> <p>2 Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelembagaan Tingkat Kecamatan</p> <p>3 Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana serta pelaksanaan inovasi Perangkat Daerah dalam mendukung penerapan kebijakan inovasi daerah</p>	<p>Peningkatan Pembinaan Desa</p> <p>1</p> <p>2 Peningkatan Peran Serta Pemuda, Perempuan, dan Anak dalam Pembangunan serta menciptakan kehidupan Masyarakat yang Berbudaya, Toleran dan Gotong Royong</p> <p>3 Penguatan Inovasi Perangkat Daerah untuk mengakselerasi kemajuan dalam pelayanan pemerintah</p>
---	---	---	---

Kecamatan Jemaja Barat – Kabupaten Kepulauan Anambas

a Barat yang baik, bersih dan akuntable	7.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			38,327,000	22.164.200	41,840,700	58,647,900	58,747,800	58,647,900	255,921,300	Kecamatan Jemaja Barat	Kepulauan Anambas
	7.01.0 1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	10,893,000	4.580.400,00	9,627,200	10,923,500	10,923,500	10,923,500	51,149,700	Kasubbag Program	Kepulauan Anambas
	7.01.0 1.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Jumlah tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan RKA Perangkat Daerah	100 %	100 %	4,556,000	3.120.800,00	4,877,400	10,422,800	10,422,800	10,422,800	40,579,800	Kasubbag Program	Kepulauan Anambas
	7.01.0 1.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Jumlah tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan RKA Perubahan Perangkat Daerah	100 %	100 %	4,322,000	2.900.800,00	4,623,300	7,999,700	7,999,700	7,999,700	32,825,400	Kasubbag Program	Kepulauan Anambas
	7.01.0 1.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Persentase tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan DPA Perangkat Daerah	100 %	100 %	4,159,000	2.750.000,00	5,145,800	6,694,200	6,794,100	6,694,200	30,006,300	Kasubbag Program	Kepulauan Anambas
	7.01.0 1.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA Perubahan Perangkat Daerah	100 %	100 %	4,126,000	2.831.800,00	5,145,800	6,794,100	6,794,100	6,794,100	30,206,100	Kasubbag Program	Kepulauan Anambas
	7.01.0 1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tersusunnya Laporan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	100 %	100 %	6,207,000	3.130.800,00	7,471,200	6,794,100	6,794,100	6,794,100	34,645,500	Kasubbag Program	Kepulauan Anambas
	7.01.0 1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	4,064,000	2.849.600,00	4,950,000	9,019,500	9,019,500	9,019,500	36,508,500	Kasubbag Program	Kepulauan Anambas
	7.01.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			15,849,000	-	32,059,500	29,145,000	29,145,000	29,145,000	116,280,000	Kecamatan Jemaja Barat	Kepulauan Anambas

Kecamatan Jemaja Barat – Kabupaten Kepulauan Anambas

7.01.0 1.2.03. 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	2,200,000	100 %	2,000,000.0 0	100 %	2,000,000.0 0	100 %	2,000,000.00	100 %	10,200,000	Sekretariat	Kepulauan Anambas
7.01.0 1.2.03. 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	4,779,500	100 %	4,345,000.0 0	100 %	4,345,000.0 0	100 %	4,345,000.00	100 %	22,159,500	Sekretariat	Kepulauan Anambas
7.01.0 1.2.03. 06	Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	25,080,000	100 %	22,800,000. 00	100 %	22,800,000. 00	100 %	22,800,000.00	100 %	116,280,000	Sekretariat	Kepulauan Anambas
7.01.0 1.2.05	Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			41,099,50 0		-		38,500,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000		178,500,000	Kecamatan Jemaja Barat	Kepulauan Anambas
7.01.0 1.2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atributnya untuk ASN	100 %	100 %	41,099,500		-	100 %	38,500,000	100 %	35,000,000. 00	100 %	35,000,000. 00	100 %	35,000,000.00	100 %	178,500,000	Kasubbag Umum Kepegawaian	Kepulauan Anambas
7.01.0 1.2.05. 09	Pendidikan danPelatih n PegawaiBer dasarkan Tugasdan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 %	100 %	-		-	100 %	-	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	-	Kasubbag Umum Kepegawaian	Kepulauan Anambas
7.01.0 1.2.06	Administra si Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			575,412,6 35		253.889.000		645,063,65 0		286,421,50 0		286,421,50 0		286,421,500		2,090,749,65 0	Kecamatan Jemaja Barat	Kepulauan Anambas
7.01.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor yg tersedia	100 %	100 %	3,183,000		4.440.800,00	100 %	8,210,400	100 %	7,464,000.0 0	100 %	7,464,000.0 0	100 %	7,464,000.00	100 %	38,066,400	Kasubbag Umum Kepegawaian	Kepulauan Anambas
7.01.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan danPerleng kapanKanto r	Tersedianya Peralatan danPerlengka panKantor	100 %	100 %	200,360,00 0		-	100 %	330,000,00 0	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	630,000,000	Kasubbag Umum Kepegawaian	Kepulauan Anambas
7.01.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %	79,464,63 5		6.559.000,00	100 %	55,000,000	100 %	50,000,000. 00	100 %	50,000,000. 00	100 %	50,000,000.00	100 %	255,000,000	Kasubbag Umum Kepegawaian	Kepulauan Anambas
7.01.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %	45,555,00 0		34.235.200,00	100 %	39,683,050	100 %	36,075,500. 00	100 %	36,075,500. 00	100 %	36,075,500.00	100 %	183,985,050	Kasubbag Umum Kepegawaian	Kepulauan Anambas

Kecamatan Jemaja Barat – Kabupaten Kepulauan Anambas

7.01.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	100 %	100 %	100 %	9.300.000,00	100 %	24.200,000	100 %	22.000.000,00	100 %	22.000.000,00	100 %	22.000.000,00	100 %	112.200,000	Kasubbag Umum Kepegawaian	Kepulauan Anambas
7.01.0 1.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	100 %	100 %	62.500.000,00	100 %	55.550,000	100 %	50.500.000,00	100 %	50.500.000,00	100 %	50.500.000,00	100 %	257.550,000	Kasubbag Umum Kepegawaian	Kepulauan Anambas
7.01.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %	100 %	167.600,000	100 %	132.420,200	100 %	120.382,000	100 %	120.382,000	100 %	120.382,000	100 %	613.948,200	Kasubbag Umum Kepegawaian	Kepulauan Anambas
7.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				40.113,000	-	116.996,000		106.360,000		106.360,000		106.360,000		542.436,000	Kecamatan Jemaja Barat	Kepulauan Anambas
7.01.0 1.2.07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	100 %	-	100 %	56.496,000	100 %	51.360.000,00	100 %	51.360.000,00	100 %	51.360.000,00	100 %	261.936,000	Kasubbag Umum Kepegawaian	Kepulauan Anambas
7.01.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Yang di Adakan	100 %	100 %	100 %	-	100 %	60.500,000	100 %	55.000.000,00	100 %	55.000.000,00	100 %	55.000.000,00	100 %	280.500,000	Kasubbag Umum Kepegawaian	Kepulauan Anambas
7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				255.353,711	416.597.760	284.309,658		258.463,325		258.463,325		258.463,325		1.318.162,958	Kecamatan Jemaja Barat	Kepulauan Anambas
7.01.0 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Surat Menyurat	100 %	100 %	100 %	35.284.800,00	100 %	41.424,900	100 %	37.659.000,00	100 %	37.659.000,00	100 %	37.659.000,00	100 %	192.060,900	Kasubbag Umum Kepegawaian	Kepulauan Anambas
7.01.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	100 %	-	100 %	5.500,000	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	25.500,000	Kasubbag Umum Kepegawaian	Kepulauan Anambas
7.01.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	100 %	211.032,711	381.312.960,00	237.384,758	100 %	215.804,325,00	100 %	215.804,325,00	100 %	215.804,325,00	100 %	1.100.602,058	Kasubbag Umum Kepegawaian	Kepulauan Anambas
7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				22.600,000	22.250.000	49.456,066		44.960,060		44.960,060		44.960,060		48.246,306	Kecamatan Jemaja Barat	Kepulauan Anambas

Kecamatan Jemaja Barat – Kabupaten Kepulauan Anambas

			7.01.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	2,860,066	100 %	2,600,060.0 0	100 %	2,600,060.0 0	100 %	2,600,060.00	100 %	13,260,306	Kasubbag Umum Kepegawaian	Kepulauan Anambas
			7.01.0 1.2.09. 06	Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	6.570.000, 00	100 %	6.570.000,00	100 %	7,546,000	100 %	6,860,000.0 0	100 %	6,860,000.0 0	100 %	6,860,000.00	100 %	34,986,000	Kasubbag Umum Kepegawaian	Kepulauan Anambas
			7.01.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Gedung Kantor	100 %	100 %	16,080,00 0	100 %	15.680.000,00	100 %	16.464.000	100 %	17.287.200	100 %	18.151.560	100 %	19.059.138	100 %	86.641.898	Kasubbag Keuangan	Kepulauan Anambas
					Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan																	
2	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Jemaja Barat		7.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,917,997, 800		1.968.346.335		2,339,311, 227		2,126,646, 570		2,126,646, 570		2,126,646,570		10,845,897,5 07	Kecamatan Jemaja Barat	Kepulauan Anambas
			7.01.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	1,825,357, 800	100 %	1.862.443.935, 00	100 %	2,231,240,6 27	100 %	2,028,400,5 70.00	100 %	2,028,400,5 70.00	100 %	2,028,400,570. 00	100 %	10,344,842,90 7	Kasubbag Keuangan	Kepulauan Anambas
			7.01.0 1.2.02. 03	Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	100 %	92,640,000	100 %	102.840.000,0 0	100 %	101,904,00 0	100 %	92,640,000. 00	100 %	92,640,000. 00	100 %	92,640,000.00	100 %	472,464,000	Kasubbag Keuangan	Kepulauan Anambas
			7.01.0 1.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	100 %	-	100 %	3.062.400,00	100 %	3,966,600	100 %	3,606,000.0 0	100 %	3,606,000.0 0	100 %	3,606,000.00	100 %	18,390,600	Kasubbag Keuangan	Kepulauan Anambas

Kecamatan Jemaja Barat – Kabupaten Kepulauan Anambas

		7.01.0 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	2,200,000	100 %	2,000,000.00	100 %	2,000,000.00	100 %	2,000,000.00	100 %	10,200,000	Kasubbag Keuangan	Kepulauan Anambas
				Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat																	
		7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi masyarakat Dalam Pembangunan Diwilayah Kecamatan			376,951,000	141,640,000			607,762,100		552,511,000		552,511,000		552,511,000		2,817,806,100	Kecamatan Jemaja Barat	Kepulauan Anambas
		7.01.0 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			296,171,000	141,640,000			475,762,100		432,511,000		432,511,000		432,511,000		2,205,806,100	Kecamatan Jemaja Barat	Kepulauan Anambas
		7.01.0 3.2.01. 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Agenda Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	296,171,000	141,640,000.00	100 %	100 %	475,762,100	100 %	432,511,000.00	100 %	432,511,000.00	100 %	432,511,000.00	100 %	2,205,806,100	Kasi PMD dan Pemdes	Kepulauan Anambas
		7.01.0 3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			80,780,000	-			132,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000		612,000,000	Kecamatan Jemaja Barat	Kepulauan Anambas
		7.01.0 3.2.03.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	100 %	100 %	80,780,000	-	100 %	100 %	132,000,000	100 %	120,000,000.00	100 %	120,000,000.00	100 %	120,000,000.00	100 %	612,000,000	Kasi PMD dan Pemdes	Kepulauan Anambas
		7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			-	-			-		-		-		-		-	Kecamatan Jemaja Barat	Kepulauan Anambas
		7.01.0 4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-	-			-		-		-		-		-	Kecamatan Jemaja Barat	Kepulauan Anambas

Kecamatan Jemaja Barat – Kabupaten Kepulauan Anambas

			7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Kasi PMD dan Pemdes	Kepulauan Anambas	
			7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			135,692,500	11,775,000		20,463,300	18,603,000	18,603,000	18,603,000	18,603,000	94,875,300		Kecamatan Jemaja Barat	Kepulauan Anambas		
			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			135,692,500	11,775,000		20,463,300	18,603,000	18,603,000	18,603,000	18,603,000	94,875,300		Kecamatan Jemaja Barat	Kepulauan Anambas		
			7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	100%	124,201,500	100%	-	100%	-	0.00	100%	0.00	100%	0.00	100%	-	Kasi Trantib	Kepulauan Anambas
			7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	100%	11,491,000	100%	11,775,000,00	100%	20,463,300	18,603,000,00	100%	18,603,000,00	100%	18,603,000,00	100%	94,875,300	Kasi Trantib	Kepulauan Anambas
2	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam memsuksekan Program dan Kegiatan Pembangunan				Persentase Partisipasi Masyarakat dalam memsuksekan Program dan Kegiatan Pembangunan																
	1	Meningkatkannya Partisipasi pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			24,445,000	16,060,000		50,161,100	45,601,000	45,601,000	45,601,000	45,601,000	232,565,100		Kecamatan Jemaja Barat	Kepulauan Anambas		
			7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			24,445,000	16,060,000		50,161,100	45,601,000	45,601,000	45,601,000	45,601,000	232,565,100		Kecamatan Jemaja Barat	Kepulauan Anambas		
			7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100%	100%	19,195,000	100%	16,060,000,00	100%	25,130,600	22,846,000,00	100%	22,846,000,00	100%	22,846,000,00	100%	116,514,600	Kasi PMD dan Pemdes	Kepulauan Anambas

Kecamatan Jemaja Barat – Kabupaten Kepulauan Anambas

		yang berb uday a, toler an, dan goton g royo ng.	7.01.0 6.2.01. 17	Koordinasi Pendampin gan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampinga n Desa di Wilayahnya	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	Kasi PMD dan Pendes	Kepulauan Anambas
Jumlah Pendanaan						3,438,591,146	2,852,722,295	3.305.955.585	3.564.146.555	3.565.110.815	3.565.918.493	16.853.853.743								

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah pada akhir periode Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel 7.1** berikut.

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KECAMATAN JEMAJA BARAT - KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD Tahun	Target dan Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC 70,00	B 79,00	B 80,80	B 81,50	B 81,85	B 82,85	B 85,00	B 85,00
2	Indeks Kepuasan layanan Masyarakat	75	76	80	80	81,85	82,85	85	85
3	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	B 79,00	B 80,00	B 80,80	B 81,50	B 81,85	B 82,85	B 85,00	B 85,00

Kecamatan Jemaja Barat – Kabupaten Kepulauan Anambas

4	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan	85%	85%	87%	88%	89%	90%	90%	100%
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Jemaja Barat merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Kecamatan Jemaja Barat. Rancangan Akhir Rencana Strategis (Restra) Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2021-2026 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Jemaja Barat dan menjadi pedoman bagi Kecamatan Jemaja Barat untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2021-2026. Demikian rumusan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Barat ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Jemaja Barat.

Impol, 24 Desember 2021

PIL. CAMAT JEMAJA BARAT,



APRIZAL, A.Mk

Penata Tk I (III/d)

NIP. 19740425 199312 1 001